

ARTIKEL

Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan

Analysis of the Level of Budget Readiness and Financing in Indonesia Removing the Nation's Capital City: Literature Study

Citation: Siswanto. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 27–41. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.27-41>

Naskah Diterima: 30 September 2022

Naskah Disetujui: 5 Oktober 2022

Naskah Diterbitkan: 30 November 2022

© Penulis



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)

Kata Kunci: Ibu Kota Negara Baru, Kesiapan Anggaran, Skema Pembiayaan IKN

Keywords: New National Capital, IKN Financing Scheme, Budget Readiness

Siswanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

siswanto2798@gmail.com

Abstrak: Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kaltim diprediksi menghabiskan anggaran Rp 466 triliun. Dalam hal ini, pemerintah memastikan 80% anggaran pembangunan IKN tidak berasal dari APBN melainkan dari skema lain seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan investor asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kesiapan kelima skema pembiayaan IKN dalam rangka pembiayaan IKN. Kajian ini mengembangkan tiga indikator untuk menilai tingkat kesiapan lima skema anggaran pembangunan IKN, yaitu indikator nilai anggaran, pertumbuhan anggaran, dan concern anggaran terhadap infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data berasal dari laporan realisasi APBN 2012-2021, laporan perkiraan biaya proyek KPBU 2017-2021, realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) 2012-2021, laporan laba bersih dan belanja modal (infrastruktur dan non infrastruktur) BUMN 2015-2021, dan laporan nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima skema pembiayaan IKN, 3 skema dinyatakan cukup siap yaitu skema PPP, swasta, dan penanaman modal asing, sedangkan skema APBN dan BUMN dinyatakan kurang siap. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi dan regulasi yang dapat memfasilitasi dan mempercepat skema PPP, penanaman modal asing, dan swasta dalam pendanaan IKN.

Abstract: The construction of the New State Capital (IKN) in East Kalimantan is predicted to spend a budget of Rp 466 trillion. In this case, the government ensures that 80% of the IKN development budget does not come from the APBN but from other schemes such as Government Cooperation with Business Entities (PPP), State-Owned Enterprises (BUMN), the private sector, and foreign investors. The purpose of this study was to assess the level of readiness of the five IKN financing schemes in order to fund IKN. This study develops three indicators to assess the level of readiness of the five IKN development budget schemes, namely indicators of value, growth, and concern for infrastructure. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The data sources come from the 2012-2021 APBN realization report, the 2017-2021 PPP project cost estimate report, the realization of the value of domestic (PMDN) and foreign (PMA) investment 2012-2021, the net profit and capital expenditure report (infrastructure and non-infrastructure) of BUMN 2015-2021, and report on the market capitalization value of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2012-2021. The results showed that of the five IKN financing schemes, 3 schemes were declared quite ready, namely the PPP scheme, the private sector, and foreign investment, while the APBN and BUMN schemes were declared less ready. Therefore, the government needs to develop strategies and regulations that can facilitate and accelerate PPP schemes, foreign investment, and the private sector in funding IKN.

1. Pendahuluan

Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia secara resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Sebelumnya, beberapa negara di dunia yang juga berencana untuk memindahkan ibu kota negaranya ke lokasi baru di antaranya adalah Mesir yang berencana memindahkan ibu kota Kairo ke ibu kota Administratif Mesir baru yang saat ini sedang dibangun (Ghalib et al., 2021). Rencana pemindahan ini dilatar belakangi karena kekhawatiran akan kepadatan penduduk di Kairo yang semakin meningkat (Sweet, 2019). Selain itu, isu rencana pemindahan ibu kota negara juga sempat mencuat di Korea Selatan di mana negara tersebut berencana memindahkan ibu kota Seoul ke Sejong City (Kwon, 2015). Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir, Rusia juga telah mengalami fluktuasi sentimen yang signifikan terkait prospek dan urgensi pemindahan ibu kota Rusia (Rossman, 2013).

Selain disebabkan karena masalah beban ibu kota Jakarta yang semakin bertambah, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga dilatar belakangi karena adanya potensi ekonomi (Kurnia, 2020). Pemindahan IKN berpotensi dapat meningkatkan PDB yang disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali (Silalahi, 2019; Jalal, 2022; dan Hasibuan & Aisa, 2020). Dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019), PDB diprediksi meningkat sebesar 0,1% sebagai efek dari pemindahan IKN. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan juga dapat menciptakan peluang pemerataan ekonomi karena munculnya pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada arus migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Kalimantan, meningkatnya investasi, dan konektivitas antar wilayah (Taufiq, 2017). Strategi pemindahan IKN juga akan memberikan kemudahan dalam membuka usaha sehingga menciptakan klaster ekonomi baru di Indonesia (Nugroho, 2020). Selain itu, pemindahan IKN juga akan berdampak pada meningkatnya investasi baru di Kalimantan Timur, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perdagangan antar wilayah (Saraswati & Adi, 2022).

Aspek anggaran dan pembiayaan menjadi poin penting dalam rencana pembangunan proyek infrastruktur tertentu (Vecchi et al., 2021). Hal ini karena pembangunan ibu kota memerlukan infrastruktur pendukung yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Morten & Oliveira, 2014). Oleh karena itu, dalam rencana merealokasi IKN ke Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan analisis terkait kesiapan skema pembiayaan tersebut dalam mendanai pembangunan IKN. Meskipun pemindahan IKN berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian, namun terdapat risiko gagalnya pembiayaan yang bersumber dari APBN, swasta murni, KPBU, dan BUMN (Silalahi, 2019 dan Hasibuan & Aisa, 2020). Studi Abubakar & Doan (2017) menemukan bahwa banyak negara di Afrika belum cukup mampu dalam menyediakan perumahan dan infrastruktur yang memadai dalam membangun proyek ibu kota baru karena biaya yang diperlukan sangat mahal. Hal ini mengindikasikan bahwa skema pembiayaan IKN juga dapat berpotensi tidak mampu dalam mendanai IKN dalam periode waktu yang ditentukan sehingga dapat menghambat dan bahkan menghentikan pelaksanaan pemindahan IKN (Saraswati & Adi, 2022). Oleh karena itu, strategi pemindahan ibu kota negara harus memerhatikan aspek ekonomi konvensional termasuk alokasi sumber daya, distribusi pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keadaan stabilitas perekonomian nasional (Saputra & Halkis, 2021).

Penelitian sebelumnya telah menganalisis tingkat kesiapan beberapa kota di Indonesia untuk menjadi calon ibu kota negara baru yang ditinjau dari berbagai aspek. Sebelum secara resmi IKN ditetapkan untuk dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Yulianti et al., (2020) menganalisis kesiapan Kota Balikpapan sebagai calon ibu kota negara baru yang diukur dengan melihat berbagai sektor unggulan yang dimiliki kota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 sektor yang dianalisis, sektor transportasi dan pergudangan; industri pengolahan; informasi dan

komunikasi menjadi sektor unggulan dan potensial bagi Kota Balikpapan dalam rangka mempersiapkan diri menjadi ibu kota negara baru. Sebelumnya, [Toun \(2018\)](#) menilai tingkat kesiapan Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota negara baru yang diukur dengan berbagai persoalan seperti kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan Sumber Daya Manusia, dan aspek sosial budaya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak faktor yang perlu untuk diperbaiki dalam rangka menyiapkan pemindahan IKN ke Kota Palangkaraya, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan dukungan lingkungan hidup. Hasil penelitian lainnya ditunjukkan oleh studi [Paramananda \(2020\)](#) yang mengevaluasi kesiapan wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota negara baru dengan mempertimbangkan aspek lokasi, kebencanaan, ekologi, pertanahan, sarana prasarana, demografi, sosial budaya, kebijakan, serta pertahanan dan keamanan.

Di dalam teori penganggaran (budgeting), tahap perencanaan anggaran merupakan tahap yang penting dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu proyek atau pekerjaan tertentu sehingga dapat ditentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang ([Ramdhani & Anisa, 2017](#)). Dalam hal proyek pembangunan IKN, pemerintah perlu memastikan aspek anggaran dan pembiayaan agar dapat memenuhi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka membangun IKN baru. Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan negara dalam proyek pembangunan IKN perlu dioptimalkan.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada belum banyaknya studi yang mengevaluasi dan menilai bagaimana kesiapan Indonesia dalam membangun IKN yang ditinjau dari sisi pembiayaan dan anggaran. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada berbagai sektor dan aspek yang dinilai secara umum, tanpa menyertakan aspek pembiayaan dan anggaran. Padahal aspek anggaran dan pembiayaan merupakan aspek krusial dalam membangun proyek infrastruktur tertentu karena tanpa adanya pembiayaan dan dana maka akan sulit bagi negara untuk membangun ibu kota negara baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui bagaimana tingkat kesiapan skema pembiayaan yang diusulkan pemerintah dalam rangka membangun dan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah agar lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan untuk pembiayaan IKN baru sehingga menghindari gagalnya pembangunan IKN di masa mendatang.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan di dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. [Zed \(2004\)](#) mengemukakan bahwa studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka berupa buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Lebih lanjut, penelitian studi pustaka tidak tergantung pada data primer yang bersumber dari lapangan karena sumber data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitian. Pada penelitian ini, data historis dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan skema pembiayaan ibu kota negara baru dianalisis untuk dijadikan landasan dalam menilai tingkat kesiapan Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara baru ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Skema pembiayaan IKN baru yang dimaksud adalah skema APBN, KPBU, BUMN, swasta murni dan investor asing.

Dalam rangka menilai tingkat kesiapan skema pembiayaan IKN, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan realisasi APBN 2012-2021, laporan nilai estimasi biaya proyek KPBU 2017-2022, reliansi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) 2012-2021, laporan laba bersih dan belanja modal (infrastruktur dan non infrastruktur) BUMN 2015-2021, dan laporan

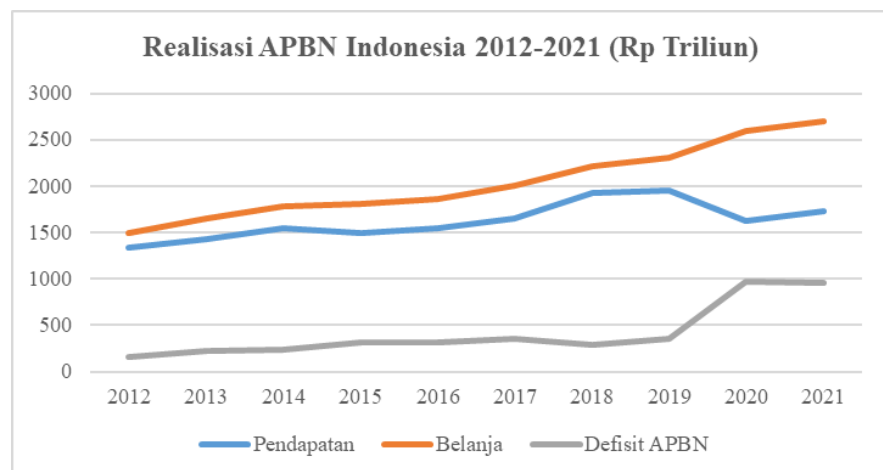
nilai kapitalisasi pasar perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2021. Untuk memperkuat argumen dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara baru.

Penelitian ini mengembangkan 3 indikator dalam rangka menilai tingkat kesiapan sumber pembiayaan IKN baru dalam mendanai pembangunan infrastruktur IKN yaitu: pertama, indikator nilai di mana sumber pembiayaan IKN dinyatakan memenuhi indikator nilai jika nilai sumber pembiayaan IKN dominan meningkat setiap tahun. Kedua, indikator pertumbuhan di mana sumber pembiayaan IKN dinyatakan memenuhi indikator pertumbuhan jika perkembangan pertumbuhan sumber pembiayaan IKN stabil dan cenderung meningkat. Ketiga, indikator infrastruktur di mana sumber pembiayaan IKN dinyatakan memenuhi indikator jika ditemukan adanya concern yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur. Skema pembiayaan IKN dapat dinyatakan “siap” apabila memenuhi 3 indikator tersebut, “cukup siap” apabila hanya memenuhi 2 indikator, “kurang siap” jika hanya memenuhi 1 indikator, dan “tidak siap” apabila tidak memenuhi semua indikator yang ditentukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Kesiapan Negara dalam Mendanai IKN Ditinjau dari APBN

Skema APBN merupakan salah satu skema pembiayaan yang dicanangkan pemerintah dalam rangka pembangunan IKN baru. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara pada tahun mendatang yang terkait dengan rencana dan proyek jangka panjang. Dalam skema APBN, pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Lebih dari 80% proporsi pendapatan APBN bersumber dari penerimaan perpajakan. Pendapatan yang diterima negara dalam setiap tahunnya tersebut kemudian didistribusikan untuk keperluan pengeluaran negara termasuk pembangunan proyek tertentu yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Lestari et al., 2019 dan Chauvet & Ferry, 2021). Pembangunan IKN baru merupakan salah satu proyek jangka panjang negara yang sebagian pembiayaannya bersumber dari APBN. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terkait dengan kesiapan APBN dalam mendanai pembangunan IKN.



Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBN Indonesia 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2021

Perkembangan realisasi pendapatan negara dalam 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat beberapa tahun tertentu yang sempat mengalami penurunan. Sebelum terjadi pandemi (2012-2019), penerimaan negara selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun, kecuali tahun 2015 yang sempat berkontraksi sebesar 3,2%. Penerimaan pada tahun 2019, merupakan pendapatan negara tertinggi dalam 10 tahun terakhir yaitu mencapai Rp 1.955 triliun. Namun setelah terjadi pandemi, pendapatan negara menurun tajam yaitu hanya Rp 1.629

triliun pada tahun 2020. Jumlah ini tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.233 triliun. Meskipun pada tahun berikutnya, pendapatan negara kembali menunjukkan pola peningkatan seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian nasional, namun jumlahnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pandemi yaitu hanya Rp 1.733 triliun. Hal tersebut menyiratkan bahwa kondisi perekonomian nasional masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

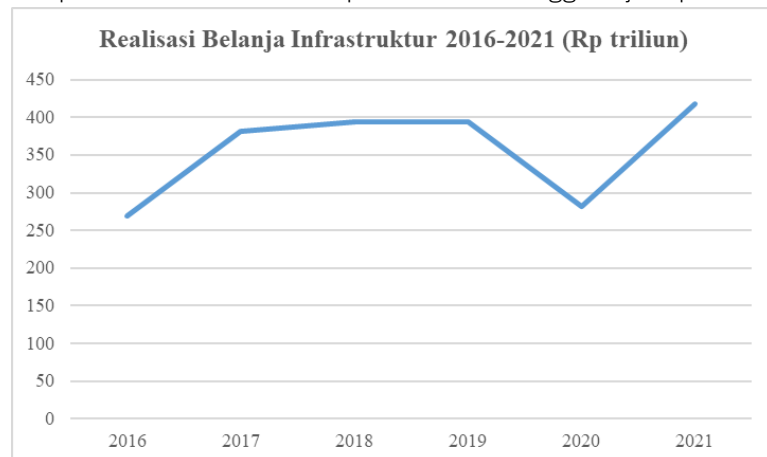
Di sisi lain, realisasi belanja negara selalu mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, jumlahnya juga selalu lebih besar dari realisasi pendapatan negara, termasuk di situasi pandemi. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam 10 tahun terakhir selalu terjadi defisit anggaran di mana belanja negara yang terealisasi lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara. Anggaran belanja negara pada tahun 2020 semula ditargetkan hanya Rp 2.540 triliun, namun akhirnya membengkak menjadi Rp 2.595 triliun. Hal tersebut sebagai dampak dari pandemi di mana negara harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk keperluan kesehatan dan program pemulihan ekonomi nasional seperti vaksinasi, program bantuan sosial, dukungan industri, dan adanya penambahan anggaran di sisi kesehatan. Selain itu, pola defisit anggaran dalam porsi APBN juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan selama pandemi defisit anggaran meningkat 3 kali lipat yaitu mencapai Rp 966,5 triliun jika dibandingkan sebelum terjadi pandemi yang hanya Rp 354 triliun.



Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Penerimaan Negara 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2021

Apabila dilihat dari indikator pertumbuhan, perkembangan pertumbuhan penerimaan negara dalam 10 tahun terakhir cenderung belum konsisten dan fluktuatif. Pada rentang tahun 2012-2015, pertumbuhan penerimaan negara cenderung menunjukkan pola menurun di mana penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2015



Gambar 3. Realisasi Belanja Infrastruktur dalam APBN 2016-2021

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016-2021

(-3,2%). Pada tiga tahun berikutnya (2016-2018), pertumbuhan penerimaan negara kembali meningkat di mana tahun 2018 merupakan peningkatan pertumbuhan negara tertinggi dalam 10 tahun terakhir (16,68%). Setelah itu, pertumbuhan penerimaan negara menurun kembali sebagai dampak dari pandemi dan meningkat kembali seiring dengan kembali pulihnya perekonomian nasional. Kondisi pertumbuhan penerimaan negara yang inkonsisten mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan negara dalam beberapa tahun kedepan akan sangat sulit diprediksi karena dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan perkembangan stabilitas perekonomian nasional.

Perkembangan realisasi belanja negara untuk infrastruktur pada porsi APBN dalam 5 tahun terakhir dominan mengalami peningkatan setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 di mana negara sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus dan porsi utama dalam APBN yaitu sekitar 11-19% setiap tahun. Bahkan ketika kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari pandemi, realisasi belanja negara untuk sektor infrastruktur pada tahun 2021 telah mencapai angka tertinggi yaitu Rp 417,4 triliun atau 15,47% dari total belanja negara. Berdasarkan hasil analisis data mengenai kesiapan APBN dalam mendanai IKN baru yang ditinjau dari indikator nilai, pertumbuhan, dan concern terhadap infrastruktur, maka didapatkan hasil tingkat kesiapan sebagai berikut:

Tabel 1. Kesiapan APBN dalam Mendanai IKN Baru

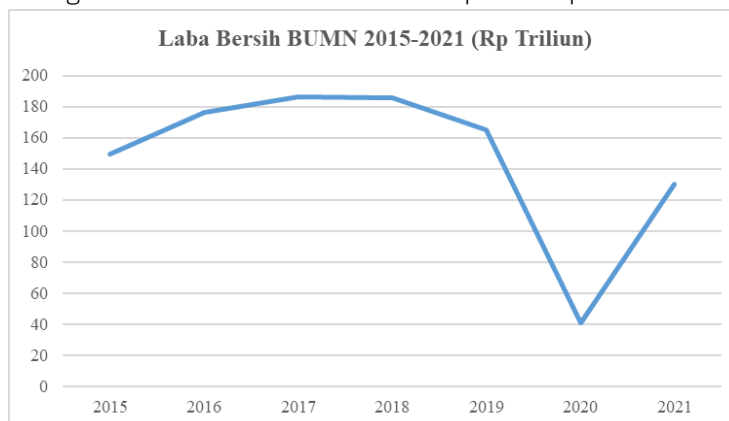
No	Indikator	Hasil	Landasan
1	Nilai Pendapatan Negara	Tidak memenuhi	Meskipun jumlah pendapatan negara semakin tinggi setiap tahun, namun terjadi defisit anggaran yang cukup besar yaitu mencapai 3 kali lipat pada 2021 dibandingkan periode sebelum pandemi (2020).
2	Pertumbuhan Pendapatan Negara	Tidak memenuhi	Pertumbuhan penerimaan cenderung belum stabil dan fluktuatif.
3	Concern terhadap infrastruktur	Memenuhi	Adanya peningkatan dan porsi belanja terhadap infrastruktur yang cukup besar.
4	Keputusan	Kurang Siap	Dari 3 indikator hanya 1 yang memenuhi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

3.2. Implikasi Pengembangan *Medical Tourism* di Kalimantan Timur

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih lanjut, tujuan didirikannya BUMN selain memperoleh keuntungan adalah sebagai alat dalam mewujudkan peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Abramov et al., 2017).

Skema pembiayaan BUMN merupakan salah satu skema pembiayaan dalam proyek pembangunan IKN baru. BUMN diharapkan dapat berkontribusi dalam

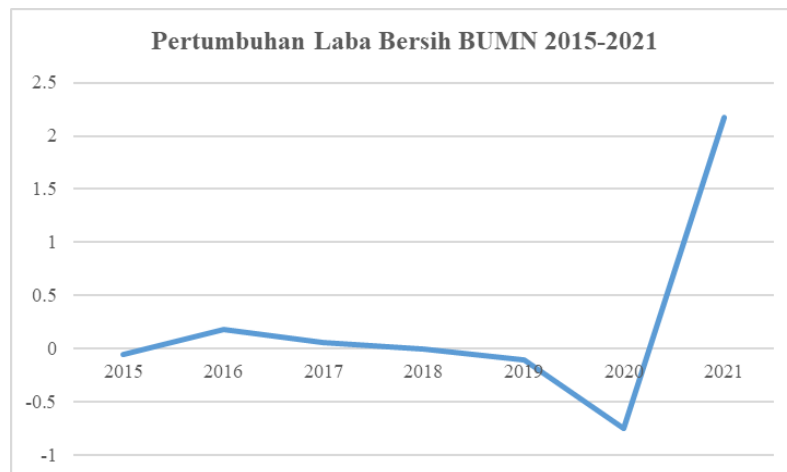


Gambar 4. Perkembangan Laba Bersih BUMN 2015-2021

Sumber: Laporan Kinerja BUMN, 2015-2021

penyertaan dana untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN seperti bandar udara dan pelabuhan. Oleh karena itu, kesehatan usaha BUMN perlu dinilai untuk mengetahui tingkat kesiapan BUMN dalam mendanai IKN baru. Pada penelitian ini, penilaian dilakukan dengan meninjau laba dan belanja modal untuk infrastruktur. Laba merupakan indikator penting dalam mengetahui kinerja dan tingkat kesehatan suatu usaha, sementara belanja modal untuk infrastruktur digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi badan usaha dalam membangun proyek infrastruktur.

Kinerja BUMN yang dinilai dari laba/rugi yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2021, BUMN selalu mencetak laba, meskipun dengan nilai yang berbeda-beda. Pada tahun 2015-2017, laba BUMN selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana laba terbesar yang diperoleh BUMN terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai Rp 186,39 triliun. Namun pada 3 periode berikutnya, laba BUMN cenderung mengalami penurunan, di mana tahun 2020 merupakan tahun di mana BUMN memperoleh laba terendah dalam 7 tahun terakhir yaitu hanya Rp 41 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari Pandemi COVID19 yang memaksa sebagian besar perusahaan BUMN untuk menurunkan tingkat produktivitas usahanya. Pada tahun 2021, kinerja BUMN kembali membaik yang dibuktikan oleh perolehan laba sebesar Rp 130,13 triliun. Namun, kinerja laba ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laba sebelum pandemi yang mencapai Rp 165,37 triliun pada 2019.



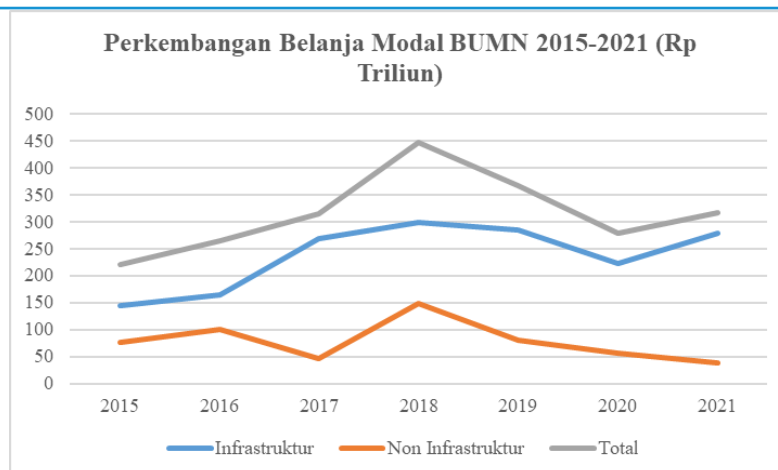
Gambar 5. Perkembangan Laba Bersih BUMN 2015-2021

Sumber: Laporan Kinerja BUMN, 2015-2021

Pertumbuhan laba BUMN dalam 7 tahun terakhir dominan mengalami penurunan setiap tahun. Pada kondisi normal sebelum terjadi pandemi, pertumbuhan laba BUMN hanya tercatat meningkat pada tahun 2016, namun setelah itu pertumbuhan laba BUMN terus menurun dan mencapai titik terendah pada 2020 sebagai efek dari pandemi. Meskipun pada tahun 2021, pertumbuhan laba BUMN meningkat pesat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai lebih dari 200%, namun kinerja labanya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi normal. Adanya peningkatan pesat pada 2021 juga disebabkan karena rendahnya laba yang diperoleh pada tahun 2020. Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan laba yang cukup pesat pada 2021 mengindikasikan bahwa kinerja BUMN mulai menunjukkan tanda-tanda pulih setelah dihantam pandemi.

Adanya pola penurunan dalam pertumbuhan laba BUMN mengindikasikan bahwa laba yang diperoleh BUMN cenderung belum stabil dan belum konsisten sehingga akan sulit diprediksi bagaimana perolehan laba BUMN dalam beberapa tahun mendatang. Mengingat laba merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan usaha, kedepannya BUMN harus terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka memperoleh laba yang lebih tinggi. Hal ini karena jika BUMN dapat memperoleh laba yang meningkat setiap tahunnya, maka mengindikasikan bahwa BUMN telah siap dalam mendanai IKN baru.

Gambar 6. Perkembangan Belanja Modal BUMN 2015-2021



Sumber: Kinerja BUMN, 2015-2021

Keterlibatan dan kontribusi BUMN dalam membangun infrastruktur dapat dilihat dari proporsi belanja modal untuk infrastruktur dengan non infrastruktur. Berdasarkan data kinerja BUMN 2015-2021 dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal BUMN sebagian besar dialokasikan untuk infrakstruktur, meskipun dalam jumlah yang beragam. Hal ini mengindikasikan komitmen BUMN dalam membangun negara melalui proyek infrastruktur cukup tinggi. Realisasi belanja modal BUMN untuk infrastruktur dalam 7 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan sejak tahun 2017, alokasi untuk infrasktruktur selalu berada di atas Rp 200 triliun. Pada tahun 2019, belanja modal untuk infrakstruktur sempat mengalami penurunan, meskipun tergolong rendah yaitu hanya 4,32%, sementara itu sebagai efek dari pandemi, tren penurunan ini dilanjutkan pada tahun 2020 (-21,83%). Meskipun kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja BUMN sepenuhnya belum stabil pada 2021, namun pada tahun tersebut realisasi belanja untuk infrakstruktur justru ditingkatkan menjadi Rp 278 triliun, sementara untuk belanja modal non infrasktruktur justru diturunkan menjadi hanya Rp 38,7 triliun. Berdasarkan hasil analisis data mengenai kesiapan BUMN dalam mendanai IKN baru yang ditinjau dari indikator nilai, pertumbuhan, dan concern terhadap infrakstruktur, maka didapatkan hasil tingkat kesiapan sebagai berikut:

Tabel 2. Kesiapan BUMN dalam Mendanai IKN Baru

No	Indikator	Hasil	Landasan
1	Perkembangan nilai laba	Tidak memenuhi	Meskipun setiap tahun BUMN selalu mencetak laba, namun nilainya cenderung menurun (2018, 2019 dan 2020)
2	Pertumbuhan laba	Tidak memenuhi	Pertumbuhan laba cenderung menurun, meskipun pada 2021, pertumbuhan laba mencapai 217%, namun hal tersebut disebabkan karena rendahnya nilai laba pada tahun sebelumnya
3	Concern terhadap infrastruktur	Memenuhi	Adanya prioritas belanja modal untuk infrakstruktur bahkan hampir mencapai 88% dari total belanja modal pada 2021
4	Keputusan	Kurang Siap	Dari 3 indikator hanya 1 yang memenuhi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

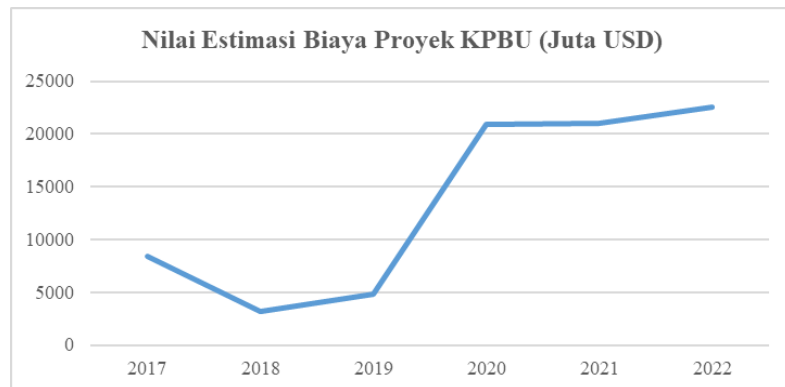
3.3. Analisis Kesiapan KPBU dalam Mendanai IKN Ditinjau dari Nilai Proyek

Dikutip dari laman resmi, yang dimaksud dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Secara garis besar, skema KPBU memiliki tujuan dalam pengadaan proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi

kepentingan masyarakat melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (Wang et al., 2018).

Skema KPBU merupakan salah satu skema yang diandalkan pemerintah dalam mendanai proyek pembangunan IKN baru. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa sebesar 80% pendanaan untuk pembangunan IKN berasal dari skema KPBU dan investasi langsung (Fadli, 2022). Karena skema KPBU menjadi andalan bagi pemerintah dalam mendanai IKN, maka perlu dilakukan analisis terkait dengan kinerja dan nilai proyek yang selama ini didanai melalui skema ini agar dapat dinilai tingkat kesiapannya dalam mendanai IKN.

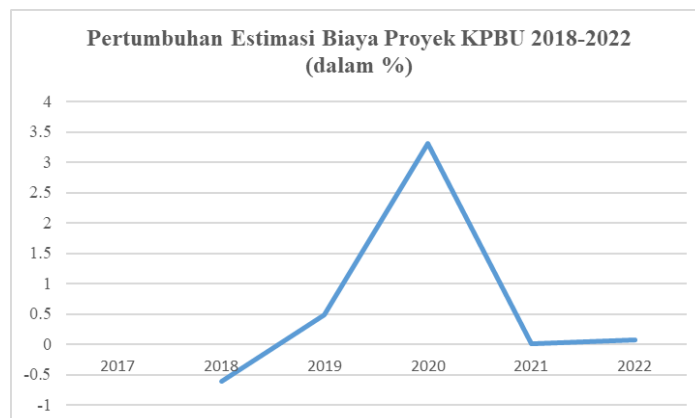
Terbentuknya skema KPBU disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran (*financing gap*) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan *creative financing* sebagai solusi selain menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan negara (Akhmetshina & Mustafin, 2015). Melalui skema KPBU ini pemerintah mengajak peran serta swasta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, namun demikian skema KPBU bukanlah privatisasi (Panayides et al., 2015). Karena tujuan utama dari terbentuknya skema KPBU adalah untuk mendanai proyek infrastruktur pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat maka mengindikasikan bahwa skema ini telah *concern* terhadap infrastruktur, sehingga indikator *concern* terhadap pembangunan infrastruktur terpenuhi.



Gambar 7. Estimasi Nilai Proyek dalam Skema KPBU 2017-2022

Sumber: Simpul KPBU, 2017-2022

Pada indikator nilai sumber pendanaan IKN, nilai biaya proyek KPBU pada 2017-2022 cenderung menunjukkan pola peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan terendah pada 2018 yaitu hanya 3251,6 Juta USD. Namun setelah itu, nilai estimasi biaya proyek KPBU selalu meningkat bahkan diperkirakan mencapai 22579,57 Juta USD pada 2022 atau meningkat hampir 7 kali lipat jika dibandingkan periode 2018. Bahkan, meskipun terjadi pandemi, nilai biaya proyek KPBU justru mengalami peningkatan yang pesat pada 2020 yang kemudian dilanjutkan pada tahun



Gambar 8. Pertumbuhan Estimasi Biaya Proyek dalam Skema KPBU 2017-2022

Sumber: Simpul KPBU, 2017-2022

2021 dan tahun ini. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ketertarikan badan usaha dalam membiayai proyek infrastruktur melalui skema ini.

Pada indikator pertumbuhan, pertumbuhan estimasi biaya proyek KPBU pada 2018-2022 cenderung masih fluktuatif. Pada periode 2018-2020 terjadi pertumbuhan estimasi biaya proyek KPBU yang pesat di mana pada 2020 terjadi pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 331%. Namun, setelah itu, pertumbuhan estimasi biaya proyek KPBU kembali menunjukkan penurunan pada 2021-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan estimasi biaya proyek KPBU selama 5 tahun terakhir belum konsisten. Berdasarkan hasil analisis data mengenai kesiapan KPBU dalam mendanai IKN baru yang ditinjau dari indikator nilai, pertumbuhan, dan *concern* terhadap infrastruktur pada estimasi biaya proyek KPBU 2017-2022, maka didapatkan hasil tingkat kesiapan sebagai berikut:

Tabel 3. Kesiapan KPBU dalam Mendanai IKN Baru

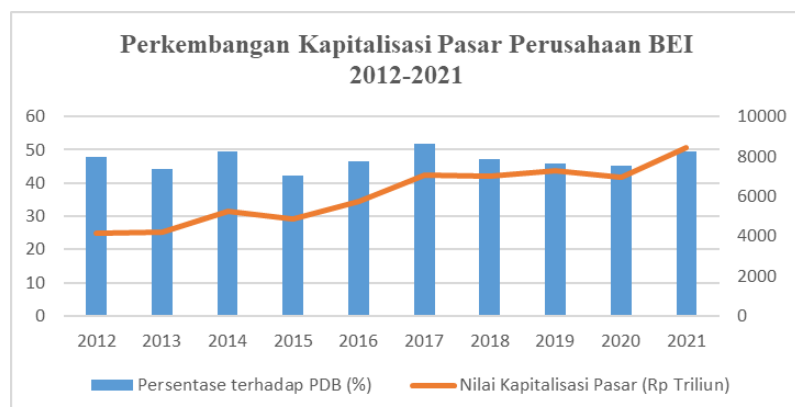
No	Indikator	Hasil	Landasan
1	Nilai Estimasi Biaya Proyek	Memenuhi	Cenderung menunjukkan pola peningkatan. Terjadi kenaikan yang pesat pada tahun 2020
2	Pertumbuhan Estimasi Biaya Proyek	Tidak memenuhi	Pertumbuhan estimasi biaya proyek cenderung belum stabil dan fluktuatif.
3	<i>Concern</i> terhadap infrastruktur	Memenuhi	Dengan berlandaskan pada tujuan terbentuknya skema KPBU yang fokus terhadap pendanaan infrastruktur
4	Keputusan	Cukup Siap	Dari 3 indikator, 2 yang memenuhi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

3.4. Analisis Kesiapan Sektor Swasta dalam Mendanai IKN Ditinjau dari PMDN dan Kapitalisasi Pasar BEI

Sektor swasta merupakan perusahaan atau organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan (Is, 2022). Investor dan sektor swasta memiliki kontribusi besar dalam membiayai proyek infrastruktur tertentu (Vecchi & Hellowell, 2013). Dalam hal ini, selain mencari keuntungan, diharapkan sektor swasta juga dapat ikut serta dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek IKN melalui penyertaan modal atau investasi langsung. Hal ini dikarenakan skema sektor swasta merupakan salah satu skema pembiayaan yang paling diandalkan pemerintah selain KPBU.

Untuk menilai tingkat kesiapan sektor swasta dalam mendanai IKN, penelitian ini meninjau perkembangan nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI). Kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan gambaran dari kekayaan perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Selain itu, untuk melihat bagaimana perkembangan keterlibatan sektor swasta dalam membangun infrastruktur, maka digunakan data nilai dan pertumbuhan investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini disebabkan karena sebagian besar nilai investasi dalam negeri berasal dari sektor swasta.



Gambar 9. Perkembangan Nilai Kapitalisasi Pasar Perusahaan BEI 2012-2021

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2012-2021

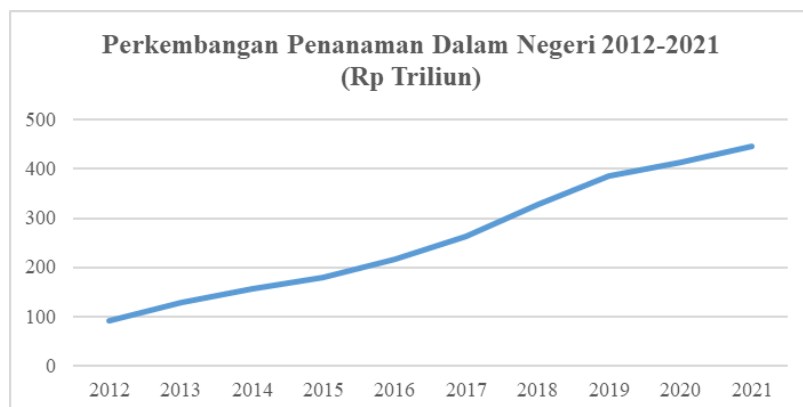
Perkembangan nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di BEI pada 2012-2021 dominan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012, nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di BEI hanya sebesar Rp 4.127 triliun atau 47,9% dari PDB, namun 10 tahun kemudian nilai tersebut meningkat hampir 2 kali lipat menjadi Rp 8.426 triliun atau hampir setengah dari nilai PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kinerja dan kekayaan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia cukup signifikan. Dalam 10 tahun terakhir, hanya terjadi 2 kali penurunan nilai kapitalisasi pasar perusahaan BEI yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2020. Semakin tinggi nilai kapitalisasi pasar perusahaan seharusnya semakin tinggi pula keterlibatan perusahaan tersebut dalam membangun proyek infrastruktur karena tingginya nilai aset yang dimiliki perusahaan sektor swasta.



Gambar 10. Perkembangan Pertumbuhan Nilai Kapitalisasi Pasar Perusahaan BEI 2013-2021

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2013-2021

Meskipun nilai kapitalisasi pasar perusahaan BEI dominan meningkat setiap tahun dalam 10 tahun terakhir, namun jika dilihat dari pertumbuhannya masih menunjukkan pola yang tidak konsisten. Berdasarkan Grafik 11 dapat dilihat terjadi penurunan cukup tajam pada pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar pada 2015, 2018 dan 2020. Hal ini membuktikan bahwa pola pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar perusahaan BEI sulit diprediksi kedepan.



Gambar 11. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012-2021

Berdasarkan data nilai PMDN pada grafik di atas, perkembangan nilai PMDN pada 2012-2021 menunjukkan pola peningkatan setiap tahun, di mana pada 10 tahun terakhir, nilai PMDN tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pada tahun 2012, nilai PMDN yang tercatat di Indonesia hanya Rp 92,182 triliun, namun setelah 10 tahun angka ini meningkat hampir 5 kali lipat menjadi Rp 447 triliun pada 2021. Ketika Pandemi COVID19 terjadi di Indonesia pada 2020 hingga 2021, nilai PMDN

tetap tumbuh masing-masing sebesar 7% dan 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi dalam negeri sudah semakin membaik sehingga menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam membangun berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. Berdasarkan hasil analisis data mengenai kesiapan sektor swasta dalam mendanai IKN baru yang ditinjau dari nilai dan pertumbuhan kapitalisasi pasar perusahaan BEI 2012-2021 dan nilai PMDN 2012-2021, maka didapatkan hasil tingkat kesiapan sebagai berikut:

Tabel 4. Kesiapan Sektor Swasta dalam Mendanai IKN Baru

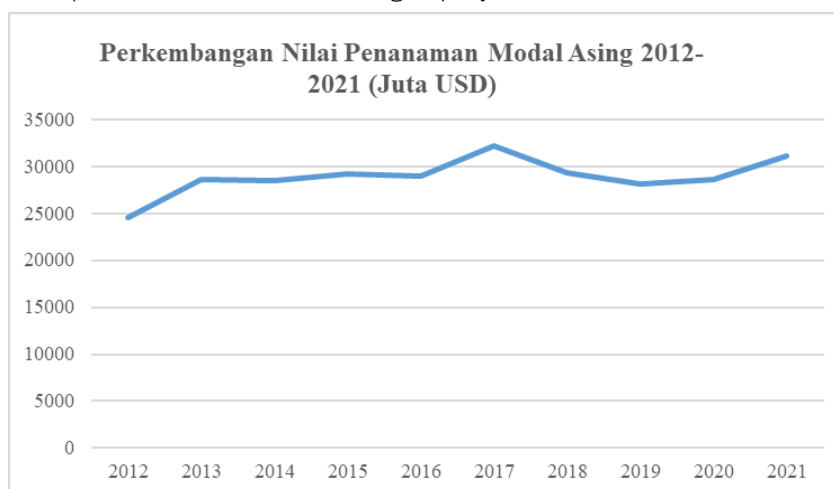
No	Indikator	Hasil	Landasan
1	Nilai Kapitalisasi Pasar BEI	Memenuhi	Cenderung menunjukkan pola peningkatan. Dalam 10 tahun terakhir, hanya 2x mengalami penurunan
2	Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar BEI	Tidak memenuhi	Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar BEI cenderung belum stabil dan fluktuatif.
3	Concern terhadap infrastruktur	Memenuhi	Nilai PMDN selalu meningkat setiap tahun
4	Keputusan	Cukup Siap	Dari 3 indikator, 2 yang memenuhi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

3.5. Analisis Kesiapan Investor Asing dalam Mendanai IKN Ditinjau dari PMA

Selain pendanaan yang berasal dari dalam negeri, pembangunan IKN rencananya juga akan melibatkan investor asing melalui aktivitas penanaman modal. Pemerintah memastikan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan IKN tidak berasal dari APBN, melainkan sektor swasta termasuk investor yang berasal dari luar negeri. Pembangunan IKN akan lebih optimal jika sumber pendanaan tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negeri (Mujiono & Sagena, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin kerja sama yang baik dengan investor luar negeri dalam mendanai IKN. Di samping itu, negara juga perlu membangun ekosistem investasi yang menguntungkan bagi Indonesia dan para investor. Saat ini, menurut BKPM, beberapa negara sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pemodal dalam mendanai IKN seperti Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa (Indraini, 2022).

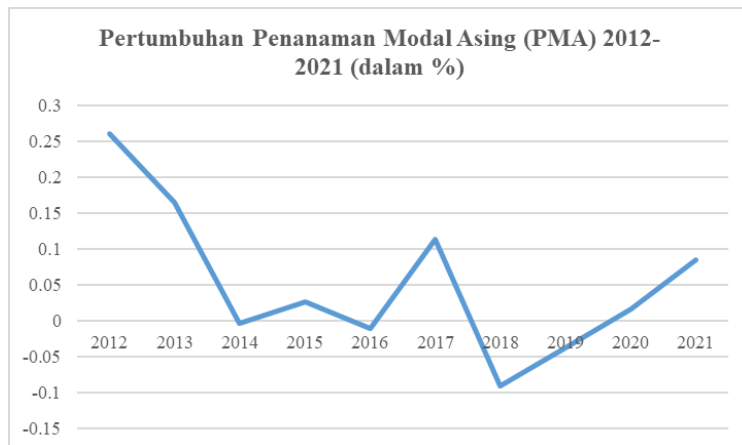
Dalam rangka menilai tingkat kesiapan investor asing dalam mendanai IKN, penelitian ini menggunakan data historis terkait dengan nilai dan pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, untuk menilai tingkat kesiapan investor asing dalam mendanai IKN yang ditinjau dari indikator concern terhadap infrastruktur, penelitian ini menilai bahwa investasi melalui PMA telah memerhatikan pembangunan terhadap infrastruktur dalam negeri. Hal ini dikarenakan sebagian besar investasi yang dilakukan oleh investor asing ke Indonesia merupakan pendanaan untuk membangun proyek infrastruktur (Laucereno, 2022).



Gambar 12. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012-2021

Perkembangan nilai penanaman modal asing dalam 10 tahun terakhir cenderung menunjukkan pola konstan namun sedikit meningkat di mana tidak terjadi penurunan atau peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012, nilai PMA yang ditanamkan ke Indonesia tercatat sebesar 24564,7 Juta USD. Angka ini kemudian meningkat sebesar 26,6% pada 10 tahun berikutnya menjadi 31093,1 Juta USD pada 2021. Penanaman Modal Asing mencatatkan nilai tertingginya pada tahun 2017 yaitu mencapai 32239,8 Juta USD. Ketika Pandemi COVID19 pada tahun 2020, PMA masih menunjukkan nilai yang cukup besar yaitu mencapai 28666,3 Juta USD atau naik 1,6% dari tahun sebelumnya.



Gambar 13. Perkembangan Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012-2021

Apabila dilihat dari indikator pertumbuhan, perkembangan pertumbuhan Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam 10 tahun terakhir cenderung masih fluktuatif atau mengalami naik turun. Pada tahun 2012-2014 terjadi penurunan pertumbuhan PMA, kemudian pada 2015 pertumbuhan PMA naik tipis, namun di tahun 2016 pertumbuhan PMA kembali menunjukkan tren penurunan. Meskipun sempat mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017, namun pada 2018 pertumbuhan PMA kembali menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Meskipun saat ini, pertumbuhan PMA kembali menunjukkan kenaikan, namun pertumbuhannya masih masih di bawah 10%. Adanya pola pertumbuhan yang tidak konsisten ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PMA masih sulit diprediksi dalam beberapa tahun kedepan karena dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kondisi ekonomi dan sosial politik di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data mengenai kesiapan sektor swasta dalam mendanai IKN baru yang ditinjau dari nilai dan pertumbuhan kapitalisasi pasar perusahaan BEI 2012-2021 dan nilai PMDN 2012-2021, maka didapatkan hasil tingkat kesiapan sebagai berikut:

Tabel 5. Kesiapan Investor Asing dalam Mendanai IKN Baru

No	Indikator	Hasil	Landasan
1	Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	Memenuhi	Cenderung konstan, sedikit meningkat dalam 10 tahun terakhir
2	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA)	Tidak memenuhi	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) cenderung belum stabil dan fluktuatif.
3	Concern terhadap infrastruktur	Memenuhi	Sebagian besar penanaman modal yang dilakukan investor asing ke Indonesia berupa proyek infrastruktur
4	Keputusan	Cukup Siap	Dari 3 indikator, 2 yang memenuhi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian mengenai tingkat kesiapan 5 skema pembiayaan IKN dalam rangka mendanai pembangunan IKN baru yang dinilai dari indikator nilai, pertumbuhan dan concern terhadap infrastruktur, terdapat 3 skema yang dinyatakan cukup siap yaitu skema KPBU, sektor swasta dalam negeri, dan investor asing, sementara 2 skema

lainnya yaitu APBN dan BUMN dinyatakan kurang siap. Hasil analisis data historis memperlihatkan bahwa sebagian besar perkembangan nilai pada sumber pembiayaan IKN menunjukkan pola peningkatan setiap tahun dan hanya terjadi penurunan pada situasi krisis seperti pandemi. Namun, pada indikator pertumbuhan, semua skema dinyatakan belum memenuhi, karena kelima skema memiliki pola pertumbuhan nilai yang fluktuatif dan sulit diprediksi. Meskipun demikian, sebagian besar skema pembiayaan juga dinyatakan cukup concern terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia jika dilihat dari data historis atau tujuan dibentuknya skema.

Keputusan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain (sekitar 80%) selain APBN dalam rangka mendanai IKN seperti sektor swasta, investor asing, dan KPBU dinilai cukup tepat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembangunan IKN tidak ekstrim dalam membebani APBN karena anggaran belanja negara untuk kebutuhan lainnya juga meningkat setiap tahun. Selain itu, perkembangan nilai sektor swasta, KPBU, dan investor asing juga cukup menjanjikan apabila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata cenderung meningkat. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana agar pembangunan IKN dapat menarik investor atau pemodal baik dalam dan luar negeri untuk mendanai IKN.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi perbaikan dalam penelitian selanjutnya, khususnya dalam aspek penilaian indikator tingkat kesiapan pada skema pembiayaan IKN. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambah atau memperbaiki indikator tingkat kesiapan agar semakin menjelaskan bagaimana tingkat kesiapan skema pembiayaan dalam mendanai IKN. Selain itu, data yang dianalisis juga masih terbatas pada aspek kuantitatif dengan melihat data historis pada tahun-tahun sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat menambah data kualitatif dengan cara melakukan wawancara ke pihak terkait agar semakin menggambarkan tingkat kesiapan skema pembiayaan dalam mendanai IKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah memudahkan peneliti dalam mencari data serta kepada pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam membantu proses penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

REFERENSI

- Abramov, A., Radygin, A., & Chernova, M. (2017). State-owned enterprises in the Russian market: Ownership structure and their role in the economy. *Russian Journal of Economics*, 3(1), 1-23.
- Abubakar, I. R., & Doan, P. L. (2017). Building new capital cities in Africa: Lessons for new satellite towns in developing countries. *African Studies*, 76(4), 546-565.
- Akhmetshina, E. R., & Mustafin, A. N. (2015). Public-private partnership as a tool for development of innovative economy. *Procedia Economics and Finance*, 24, 35-40.
- Chauvet, L., & Ferry, M. (2021). Taxation, infrastructure, and firm performance in developing countries. *Public Choice*, 187(3), 455-480.
- Fadli, A. (2022). Jokowi Sebut 80 Persen Anggaran IKN Berasal dari KPBU dan Investasi Langsung. Retrieved from <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/22/190000721/jokowi-sebut-80-persen-anggaran-ikn-berasal-dari-kpbu-dan-investasi>
- Ghalib, H., El-Khorazaty, M. T., & Serag, Y. (2021). New capital cities as tools of development and nation-building: Review of Astana and Egypt's new administrative capital city. *Ain Shams Engineering Journal*, 12(3), 3405-3409.
- Hasibuan, R. R., & Aisa, S. (2020). Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota terhadap Ekonomi di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183-203.
- Indraini, A. (2022). Bahlil Bilang Jangan Ragu soal Investasi di IKN, Ada China-Uni Emirat Arab. Retrieved from <https://finance.detik.com/properti/d-6280963/bahlil-bilang-jangan-ragu-soal-investasi-di-ikn-ada-china-uni-emirat-arab>
- Is, M. S. (2022). Hukum Perusahaan di Indonesia. Prenada Media.
- Jalal, A. (2022). Relokasi Ibu Kota Negara dan Dampak Ekonomi Politik pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Makalah.
- Kurnia, A. (2020). Relocation of capital city: contemporary research on impact on Borneo's economy. Munich Personal RePEc Archive, 1-7.
- Kwon, Y. (2015). Sejong Si (City): Are TOD and TND models effective in planning Korea's new capital? *Cities*, 42, 242-257.
- Laucereno, S. F. (2022). RI Jadi Tujuan Investasi Asing di Sektor Infrastruktur, Bagaimana Potensinya? Retrieved from <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6153612/ri-jadi-tujuan-investasi-asing-di-sektor-infrastruktur-bagaimana-potensinya>

- Lestari, N. N., Bagia, I. W., & Jana, G. P. (2019). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24-33.
- Morten, M., & Oliveira, J. (2014). Migration, roads and labor market integration: Evidence from a planned capital city. Unpublished manuscript.
- Mujiono, D. I., & Sagena, U. W. (2020). Opportunities of International Cooperation in Relocating the New Capital of Indonesia. *Interdependence Journal of International Studies*, 1(1).
- Nugroho, D. (2020). Bentuk dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 4(1), 53-62.
- Panayides, P. M., Parola, F., & Lam, J. S. (2015). The effect of institutional factors on public-private partnership success in ports. *Transportation research part A: policy and practice*, 71, 110-127.
- Paramananda, D. (2020). Analisis Kesiapan Wilayah Calon Lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1).
- Rossmann, V. (2013). In search of the fourth Rome: Visions of a new Russian capital city. *Slavic Review*, 72(3), 505-527.
- Saputra, S. D., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 192-220.
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Silalahi, S. A. (2019). Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Info Singkat.
- Sweet, R. (2019). Dreamland: A critical assessment of Egypt's plan for a brand new capital. *Construction Research and Innovation*, 10(1), 18-26.
- Taufiq, M. (2017). Pemindahan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. In Prosiding Seminar Nasional Pemindahan ibu kota Negara, (pp. 99-115).
- Toun, N. R. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 129-148.
- Vecchi, V., & Hellowell, M. (2013). Securing a better deal from investors in public infrastructure projects: insights from capital budgeting. *Public Management Review*, 15(1), 109-129.
- Vecchi, V., Casalini, F., Cusumano, N., & Leone, V. M. (2021). Principles of Capital Budgeting for Infrastructure Financing. Palgrave Macmillan, Cham, 117-144.
- Wang, H., Xiong, W., Wu, G., & Zhu, D. (2018). Public-private partnership in Public Administration discipline: a literature review. *Public management review*, 20(2), 293-316.
- Yulianti, N., Firmansyah, R., & Sundari, S. (2020). Analisis Potensi Sektor Unggulan Kota Balikpapan Dalam Mempersiapkan Ibu Kota Baru Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 1-13.
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia